

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian pajak**

Pajak<sup>1</sup> adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, yang tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada disektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) kesektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa. Jika pemungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut distribusi.

Dari definisinya, pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin mahal. Tetapi jika nilainya negatif (subsidi), pajak akan

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia edisi 10*, (Jakarta: Salemba 4, 2011), 3-4.

meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga *output* atau *input* menjadi lebih murah.<sup>2</sup>

## 2. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturannya yang sifatnya bisa dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun atau pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

## 3. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek<sup>3</sup>

### a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju sejahtera. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manuruno, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 446.

<sup>3</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 4.

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan tanpa ada ikut andil pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepentingan bersama. Sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.

b. Aspek hukum

Hukum pajak mempunyai kedudukan secara hirarki yang jelas dengan urutan yaitu, undang-undang 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Hirarki ini dijalankan secara ketat peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan tingkatnya yang lebih tinggi.

c. Aspek keuangan

Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan gas dan bangunan, tapi lebih berupaya menjadikan pajak sebagai

primadona penerimaan negara. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

Rasio pajak yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2010 baru mencapai 11,1 % Pajak dapat meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat tercipta kemandirian dalam pembiayaan nasional.

d. Aspek sosiologi

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Berarti dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana berasal dari rakyat (*saving private*) dan dari pemerintah (*public saving*)

Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak ada tujuan yang dikehendaki yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor.

#### **4. Macam –Macam Fungsi Pajak<sup>4</sup>**

Fungsi pajak ada dua antara lain sebagai berikut:

##### a. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contoh: dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

##### 1) Fungsi mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau penentuan pelaksanaan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

#### **5. Sistem Pemungutan Pajak<sup>5</sup>**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

##### a. Sistem *official assessment*

---

<sup>4</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 4-6.

<sup>5</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 6.

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Sistem *self assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri dan melampirkan sendiri berdasarkan pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

## **6. Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam<sup>6</sup>**

a. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah.

Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan

---

<sup>6</sup>Nurul Huda dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2015), 53-54.

kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian kedalam tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga (*household*), perusahaan (*firm*) dan pemerintah (*government*).

Adanya unsur pemerintah menimbulkan dua konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dan dari sudut penerimaan memunculkan konsep pajak (*tax*). Tentunya hal ini menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran.

Dimana :

$$Y = C + I + G$$

$C$  = *Consumption* (pengeluaran yang dilakukan rumah tangga)

$I$  = *Investment* (pengeluaran yang dilakukan perusahaan)

$G$  = *Government expenditure* (pengeluaran yang dilakukan pemerintah)

Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi:

$$Y = C + S + T$$

Dimana :

$C = \textit{Consumption}$  (konsumsi)

$S = \textit{Saving}$  (tabungan)

$T = \textit{Tax}$  (Pajak)

Persamaan akan berkembang jika kemudian pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya (*transfer payment*/ $T_p$ ) sehingga persamaan berkembang menjadi :

$$Y = C + S + T - T_p$$

- b. Pengertian kebijaksanaan fiskal (pajak) dalam perspektif ekonomi islam<sup>7</sup>

Dalam Negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

---

<sup>7</sup> Nurul Huda dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 63.



Pada masa kenabian dan kekhilafahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijaksanaan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *baitulmal* (*national treasury*), dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj* dan *usyur* (bea cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak pada keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak menurun drastis seiring dengan aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin secara otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.

Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas

distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak *surplus* muslim dengan pihak *deficit* muslim hal ini dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum muslimin atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*).

Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga memiliki implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.

Coba perhatikan QS. At.Taubah: 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*”ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (656) dan menyucikan (657) mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>8</sup>

Maknanya yaitu sebagai berikut :

(656) maksudnya: zakat itu membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda.

(657) maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan benda mereka.

## **B. Produk Domestik Bruto (PDB)**

### **1. Pengertian Produk Domestik Bruto<sup>9</sup>**

Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional dan pendapatan nasional dibedakan kepada dua pengertian: Produk Nasional Bruto (PNB) yang diwujudkan oleh faktor-faktor

---

<sup>8</sup> Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur’an Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012).

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar edisi ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

produksi milik warga negara suatu negara dinamakan produk nasional bruto, sedangkan produk domestik bruto merupakan produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negara (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara.

Pendapatan nasional yang merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun) dihitung dengan satuan mata uang. Perhitungan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan:<sup>10</sup>

- a. Metode produksi
- b. Metode pengeluaran
- c. Metode pendapatan

Penulis hanya menjelaskan metode produksi saja yang terkait dengan judul yang akan dibahas. Metode produksi (Produk Domestik Bruto) Perhitungan dengan metode ini menghasilkan PDB diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value edit*) dari semua sektor produksi. Kegunaan konsep nilai

---

<sup>10</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), 12- 13.

tambah dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda.

PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang beralokasi dalam perekonomian outputnya diperhitungkan dalam PDB. Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan.<sup>11</sup>

Sebagai ilustrasi, dalam produksi pakaian sebaiknya tidak memasukkan seluruh harga sebuah pakaian ke dalam perhitungan PDB dan juga tidak memasukkan harga kain, benang, ataupun kapas sebagai perhitungan PDB. Komponen tersebut merupakan barang antara (*intermediary goods*) yang tidak dimasukkan dalam komponen PDB. Hal yang dimasukkan dalam komponen PDB adalah barang jadi atau barang siap pakai.<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Produk Domestik Bruto Dalam Perspektif Islam<sup>13</sup>**

Dalam pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan

---

<sup>11</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manuruno, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, 20.

<sup>12</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 12- 13.

<sup>13</sup> Nurul Huda, dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 27- 28.

ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP perkapita) kritik terhadap GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu *pleasure/istirahatnya* tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Beberapa keberatan penggunaan GDP riil/kapita sebagai indikator suatu negara sebagai berikut:

- a. Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, jika tercakup dalam GNP.
- b. GNP juga tidak menghitung waktu istirahat (*leisure time*) padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang semakin menginginkan waktu istirahat.

- c. Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan.
- d. Masalah polusi juga sering dihitung dalam GNP banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksi menghasilkan polusi air maupun udara, jelas akan merusak lingkungan.

Bagaimana ekonomi Islam mengkritis perhitungan GDP riil/kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan suatu negara? satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *fallah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk kedalam pengertian fallah ini.

Ekonomi Islam dalam artian (*nidhom al-istihad*) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Memang benar bahwa semua sistem ekonomi baik yang sudah tidak eksis lagi dan telah terkubur oleh sejarah maupun yang saat ini sedang berada dalam di puncak kejayaannya, bertujuan untuk mengantarkan kesejahteraan pemeluknya, namun lebih sering

kesejahteraan itu diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, yang kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan perkapita *income* yang tinggi. Jika hanya itu ukurannya, maka kapitalis modern akan mendapat angka maksimal. Akan tetapi pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen yang menyusun kesejahteraan *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep kepada rohaninya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasmaniah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani di mana roh merupakan esensi manusia.<sup>14</sup>

Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument-instrument wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan sosial berdasarkan

---

<sup>14</sup> Nurul Huda dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoriti*, 31-32.



sistem moral dan sosial Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih, empat hal tersebut adalah:

1. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individual Rumah Tangga

Kendati PDB dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, PDB tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. Semestinya, perhitungan pendapatan nasional Islam harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan

Barangkali inilah yang menjelaskan, ketika pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin, terjadi banyak ketidakpuasan, karena daftar yang nyata dari rakyat yang dikategorikan miskin sesungguhnya sangat tidak akurat. Perhitungan dari BPS didasarkan pada survei yang kurang

mencerminkan kenyataannya, sementara angka PDB memang tidak dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah penduduk miskin.

Persoalan lainnya adalah, didalam perhitungan PDB konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang pokok. Maksudnya, produksi beras menghasilkan Rp. 10 juta, maka untuk lebih mendekati pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat ketimbang produksi barang-barang mewah.

## 2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi Disektor Perdesaan

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas pertanian swasembada, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem kedalam perhitungan PDB. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi pertanian swasembada tersebut harus masuk kedalam perhitungan pendapatan nasional tersebut.

Komoditas pertanian swasembada ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam pencatatan perekonomian dunia.

Satu contoh, kita juga tidak dapat mengetahui, sekarang kondisinya dan apakah sedang naik atau malah sedang turun. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan pembuatan kebijakan untuk mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat lapisan bawah yang secara masa memiliki jumlah tersebar.

Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas pertanian swasembada ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga yang secara nyata diterima petani atau yang diharapkan akan diterima petani, dan satu paket dengan harga lainnya yang akan diberikan kepada konsumen dipasar eceran. Peningkatan produksi pertanian ditingkat rakyat pedesaan, umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan ditingkat konsumen, atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang

perantara, yang posisinya berada diantara petani dan konsumen. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor pertanian swasembada ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena disektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah distribusi pendapatan.<sup>15</sup>

### 3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai presentase total konsumsi. Hal ini perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu Negara atau bangsa.

---

<sup>15</sup> Nurul Huda, dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 33.

Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan *Nordhaus dan Tobin dengan Measures for Economic Welfare* (MEW), dalam konteks ekonomi Barat. Jika PDB mengukur hasil, maka MEW dikontribusi kepada kesejahteraan rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.

#### 4. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran Dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar Saudara Dan Sedekah

Kita tahu bahwa PDB adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan *transfer payment* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Dan ini bukan sekedar pemberian secara sukarela pada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Didalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak mudah memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari

pergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam.

Pada sejumlah negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan, memiliki peran lebih penting dibandingkan di negara Barat. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi yang diambil oleh keluarga maupun suku, tetapi juga ada banyak ragam kewajiban santunan diantara anggota keluarga. Tidak semuanya melibatkan jumlah uang yang besar, karena yang terjadi yang kecil nilainya. Ada suatu kesenjangan keterkaitan antara jasa dan pembayaran, misalnya donasi untuk pemeliharaan masjid, mengaji masjid, kegiatan pedesaan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Merupakan suatu yang penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal shadaqah antar saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibandingkan amal sedekah yang sering

---

<sup>16</sup> Nurul Huda, dkk., eds, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 35.

dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai presentase dari PDB. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.

## **C. Inflasi**

### **1. Pengertian inflasi**

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara ritel tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara ritel pendapatan

mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga.<sup>17</sup>

Secara umum, inflasi rendah masih dapat diterima, bahkan dalam tingkat tertentu bisa mendorong perkembangan ekonomi. Misalnya Indonesia mengalami inflasi 3%. Dengan inflasi tersebut, berarti harga barang naik sekitar 3% juga. Keadaan tersebut mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka (sesuai hukum penawaran, apabila harga barang/ jasa naik maka produsen akan menambah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan).

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena dari sisi permintaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat. Turunnya permintaan akan direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah produksi. Pada akhirnya roda perekonomian ikut terpengaruh menjadi melambat dan PDB mengalami penurunan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Iskandar Putong, Economics *Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 417.

<sup>18</sup> Iskandar Putong, Economics, *Pengantar Mikro dan Makro*, 419.



Dalam teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya.

## 2. Jenis Inflasi<sup>19</sup>

Adapun jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat laju inflasi dan berdasarkan pada sumber atau penyebab inflasi.

### a. Berdasarkan Tingkat/Laju Inflasi

- 1) *Moderat inflation* (laju inflasinya antara 7-10 %) adalah inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat.
- 2) *Galloping inflation* adalah inflasi ganas (tingkat laju inflasinya antara 20-100%) yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian dan timbulnya distorsi-distorsi besar dalam perekonomian.
- 3) *Hyper inflation*, adalah inflasi yang tingkat laju inflasinya sangat tinggi (diatas 100%). Inflasi ini sangat mematikan kegiatan perekonomian masyarakat.

### b. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi

---

<sup>19</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 306.

- 1) *Demand full inflation*, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. Permintaan *aggregate* meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya timbul inflasi.
- 2) *Cost push inflation*, inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga *input* seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan *input* lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negara.
- 3) *Imported inflation*, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan produksi.

c. Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan kepada:

1) *Domestik Inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negara. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari dalam negara. Atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negara atau *impor cost push inflation*.

2) *Imported inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negara. Misalnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari luar negara atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negara atau *imported cost push inflation*.<sup>20</sup>

### **3. Inflasi menurut perspektif ekonomi Islam**

Menurut pemikir ekonomi Islam yaitu al-Maqrizi, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan

---

<sup>20</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas*, 306.

berlangsung terus-menerus. Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi pada fenomena sosial ekonomi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat. Inflasi menurutnya, terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Persediaan barang mengalami kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama.<sup>21</sup>

Umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi adalah:<sup>22</sup>

- a. *Natural inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif ( $AS\downarrow$ ) atau naiknya permintaan agregatif ( $AD\uparrow$ ). Maka natural inflasi dapat diartikan sebagai:

Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian ( $Q$ ). Jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi menurun ( $Q\downarrow$ ) sedangkan jumlah

---

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 270.

<sup>22</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 299-302.

uang beredar ( $M$ ) dan kecepatan peredaran uang ( $V$ ) tetap maka konsekuensinya tingkat harga naik ( $P\uparrow$ ).

Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar menurun ( $M\downarrow$ ). Jika kecepatan peredaran uang ( $V$ ) dan jumlah barang dan jasa ( $T$ ) tetap, terjadi kenaikan harga ( $P\uparrow$ ). Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua yaitu:

- 1) Uang yang masuk dari luar Negara terlalu banyak karena ekspor meningkat ( $X\uparrow$ ), sedangkan impor menurun ( $M\downarrow$ ), sehingga *net ekspor* nilainya sangat besar mengakibatkan naiknya permintaan agregatif ( $AD\uparrow$ ).
  - 2) Turunnya tingkat produksi ( $AS\downarrow$ ) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo ekonomi.
- b. *Human error inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi yang disebabkan oleh *human error inflation* terjadi karena korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani, dan jumlah mata uang yang berlebihan.

## **D. Nilai tukar**

Dalam ilmu ekonomi nilai tukar mata uang suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar riil dan nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata uang rupiah yang ditukarkan ke dalam mata uang negara lain. Contohnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sedangkan nilai tukar riil adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar riil menyatakan tingkat dimana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara dengan negara lain.<sup>23</sup>

### **1. Penentuan Nilai Tukar**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu:

#### **a. Faktor Fundamental**

---

<sup>23</sup> Wijayanti, "Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro (2004-2005)", (S.E, skripsi, Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2015), 15

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral.

b. Faktor Teknis

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.

c. Sentimen Pasar

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

## **2. Perubahan Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, aktivitas pertukaran mata uang atau kurs disebut aktivitas *sharf*. Pada aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. *Sharf* adalah jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti rupiah

dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Menurut An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam, apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini tidak diperbolehkan bila akad dan penyerahannya sudah sempurna. Kecuali disana terjadi penipuan yang keji (*ghabu fasihy*), atau cacat maka boleh.<sup>24</sup>

Nilai tukar kurs dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat perubahan nilai atau dinamakan perubahan harga relatif (merujuk pada inflasi berarti harga nominal atau perubahan dari seluruh harga, sedangkan perubahan harga relatif tidak semua harga barang berubah). Jadi dapat dikatakan perubahan tingkat harga maupun kurs dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dari uraian diatas, maka perubahan nilai tukar uang dalam ekonomi Islam hukumnya mubah atau boleh dengan syarat:

a. Pada sistem kurs tetap

Perubahan nilai tukar uang, bank sentral harus menetapkan harga valuta asing (valas) dan menyediakan atau

---

<sup>24</sup> Saiful Anwar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume Nomor 1, ( Juni 2016), 3



tetap bersedia membeli dan menjual valas dengan harga yang telah disepakati bersama. Jika terjadi perubahan permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah (dalam hal ini bank sentral) agar segera melakukan intervensi dengan cara menambah penawaran dari satu mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan dapat tetap terpelihara.

b. Pada sistem kurs fleksibel atau sistem kurs mengapung

Pemerintah tetap mengawasi jalannya mekanisme perubahan nilai tukar tersebut sehingga spekulasi atau permainan nilai mata uang tidak terjadi atau dibiarkan bebas. Sehingga kurs tidak melonjak drastis akibat tidak adanya intervensi pemerintah.

### **3. Syarat-syarat dalam pertukaran mata uang atau kurs<sup>25</sup>**

Dalam pertukaran kurs harus memenuhi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam hadist atau dalilnya kebolehan pertukaran tersebut adalah: “Juallah emas dengan dengan perak

---

<sup>25</sup> Wijayanti, “Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro (2004-2005)”, (S.E, Skripsi, Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2015), 10.

sesuka kalian, dengan (syarat harus) konstan”. (Hr. Imam At-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit).

Dari dalil tersebut, maka syarat-syarat dari nilai tukar uang atau kurs antara lain:

- a. Harus tunai, tidak dengan cara kredit
- b. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak
- c. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama. Tapi jika dalam pertukaran antara dua jenis mata uang hanya diisyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

#### **4. Pandangan Sistem Ekonomi Islam Terhadap Konsep *Time of Value Money*<sup>26</sup>**

##### *a. Teori Sistem Ekonomi Islam dalam Nilai Tukar*

Sistem ekonomi Islam membolehkan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi modern yang ada tidak bertentangan dengan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah hal

---

<sup>26</sup> Saiful Anwar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume Nomor 1, ( Juni 2016), 4

yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak berpengaruh oleh kekayaan sebab banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Dengan demikian, teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan faktor kebutuhan. Dimana yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari dua penukar pada mata uang yang menjadi milik penukar lain.

Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar uang diwujudkan dalam mekanisme bagi hasil dan jual belikan peredaran modal yang sebebaskan-bebasnya membuat perekonomian suatu negara satu demi satu akan rusak dan kredit macet menjadi gejala global. Bagaimana tidak, pasar uang yang telah berkembang begitu cepat sehingga terlepas dari pasar barang dan jasa. Dari uraian di atas jelas bahwa

teori ekonomi Islam dalam nilai tukar uang yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Dalam nilai tukar uang, baik dilakukan dalam satu negara ataupun antar negara, wujud transaksi itu harus jelas, konstan, ada pada saat dilaksanakan transaksi, dan jenis serta kuantitasnya harus sama (jika dilakukan dalam satu negara yang mata uang sama atau negara yang mata uangnya berdasar emas dan perak).
- b) Uang bukan komoditas, praktek penggandaan uang dan spekulasi dilarang, sehingga bentuk-bentuk transaksi maya dapat dihindarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang, karena pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. Pertumbuhan yang tidak seimbang akan menjadi sumber krisis seperti terjadi sekarang. Pelarangan riba pada hakikatnya merupakan pelanggaran transaksi maya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ar-Ruum: 39 yang artinya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Saiful Anwar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume Nomor 1, ( Juni 2016), 5

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٥﴾

*“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>28</sup>*

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan

---

<sup>28</sup> Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012

dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut hasil review terhadap penelitian terdahulu:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Wijayanti, “Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro tahun 1976-2013”. Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaan: variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu faktor ekonomi makro terhadap penerimaan pajak. Perbedaan: penelitian ini menganalisis variabel bebas makro ekonomi yang berbeda dengan penelitian penulis sekarang. Di penelitian sebelumnya variabel bebasnya adalah pajak dan terikatnya faktor ekonomi makro dan metodologi penelitiannya menggunakan metode model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*).
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wenni Rismawati, “Pengaruh Variabel Pajak Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus: 2001-2012)”. Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaan: variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu faktor ekonomi

makro terhadap penerimaan pajak. Perbedaan: penelitian ini menganalisis variabel bebas makro ekonomi yang berbeda dengan penelitian penulis sekarang. Di penelitian sebelumnya variabel terikatnya penerimaan pajak penghasilan (ppn) berbeda dengan penelitian saat ini berfokus pada penerimaan pajak secara agregat.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andar Rohnal Sinaga, “Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia 1984-2007”. Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaan: variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu faktor ekonomi makro terhadap penerimaan pajak. Perbedaan: penelitian ini menganalisis variabel bebas makro ekonomi yang berbeda dengan penelitian penulis sekarang. Melihat bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan menghitung berapa besar pengaruhnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) dengan variabel makro ekonomi.

## **F. Hubungan Antar Variabel<sup>29</sup>**

### **1. Hubungan antara Produk Domesik Bruto terhadap Penerimaan Pajak**

Besarnya jumlah pajak yang dibayarkan tergantung pada tarif pajak dan pendapatan. Pendapatan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan PDB riil sehingga besarnya penerimaan pajak juga tergantung pada PDB riil. Ketika PDB riil mengalami peningkatan pada saat ekspansi, upah dan keuntungan juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, penurunan PDB riil pada saat depresi akan menyebabkan upah dan keuntungan menurun. Penurunan upah dan keuntungan tersebut akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak. Penelitian terdahulu menyebutkan yaitu “Andar Rohnal Sinaga, Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia 1984-2007, Respon total penerimaan pajak terhadap perubahan PDB sebesar 1%”.

### **2. Hubungan antara Inflasi terhadap Penerimaan Pajak**

---

<sup>29</sup> Wijayanti, “Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro (2004-2005)”, (S.E, Skripsi, Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2015), 29-35



Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak jika pajak yang dibebankan atas suatu objek dalam bentuk persentase dari nilai objek pajak tersebut. Tingkat inflasi dapat diperoleh atas kontribusi pemerintah melalui kegiatan penciptaan uang yang digunakan untuk mendanai sebagian pengeluarannya. Tingkat inflasi yang diperoleh tersebut nantinya dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui jalan yang berbeda. Ketika terjadi inflasi, tarif spesifik akan tetap sehingga Pemerintah akan mengalami kehilangan pendapatan ketika harga meningkat. Hal tersebut karena peningkatan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Penurunan jumlah barang yang diminta akan menyebabkan pajak yang ditarik menjadi lebih sedikit, sehingga penerimaan pajak juga akan berkurang. menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dan penerimaan pajak spesifik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan kurva yang menurun. Tingkat inflasi yang tinggi akan berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak spesifik, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan yaitu “Amalia Wijayanti, Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro tahun 1976-2013, variabel inflasi

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang maupun model jangka pendek penerimaan pajak.

### **3. Hubungan antara Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak**

Kebijakan ekonomi di beberapa negara berkembang yang telah diobservasi sering menunjukkan hubungan negatif antara penerimaan pajak suatu negara dan tingkat riil nilai tukar resmi. Penguatan yang terjadi pada nilai tukar resmi riil (nilai mata uang domestik per unit mata uang asing mengalami penurunan) akan menyebabkan penurunan pada rasio pajak terhadap PDB. Hubungan negatif antara penerimaan pajak dan tingkat nilai tukar dapat dikaitkan dengan efek langsung penguatan nilai tukar terhadap bea impor, pajak ekspor, serta pajak penjualan dan cukai. Hasil dari penelitian terdahulu menyebutkan yaitu “ Andar Rohnal Sinaga, Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia 1984-2007, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah 1.42% Respon penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perubahan nilai tukar Rupiah sebesar 1% adalah 1.03%”.

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan diantara dua variabel sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan adanya hubungan diantara dua variabel.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : PDB secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ha1 : PDB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ho2 : Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ha2 : Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ho3: Nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

---

<sup>30</sup> Uma Sakaran, *Research Method For Bussines*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 135

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73

Ha3 :Nilai tukar secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ho3 : PDB, Inflasi dan nilai tukar secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Ha3 :PDB, Inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.